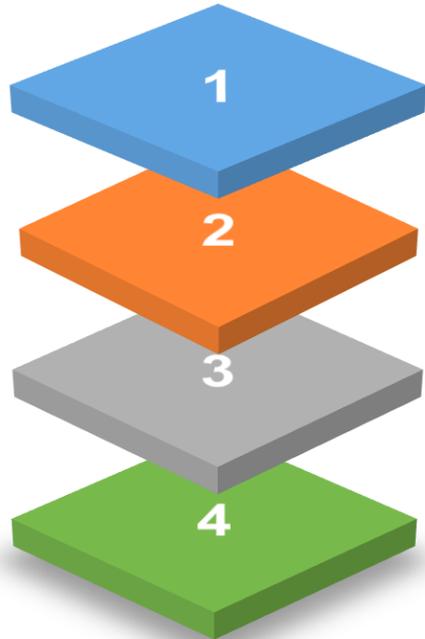


RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN TEGAL

Slawi, 20 Oktober 2020

OUTLINE



PERKEMBANGAN EKONOMI DAN INFLASI



PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL DIGITAL



PENUTUP



PERKEMBANGAN EKONOMI DAN INFLASI

Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan

Sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan juga mengalami perlambatan. Adapun sektor yang mengalami kontraksi terdalam di Wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan adalah: (i) Transportasi dan Pergudangan; (ii) Jasa Lainnya; serta (iii) Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum.

EKONOMI NASIONAL

Perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik juga mulai terindikasi pada Juli 2020 setelah mengalami kontraksi pada triwulan II-2020.

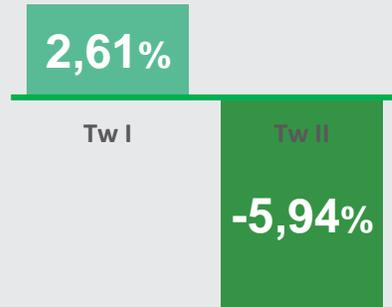


- Semester II-2020, pertumbuhan ekonomi domestik diprakirakan membaik, didorong:
- Kenaikan permintaan domestik sejalan relaksasi PSBB.
 - Peningkatan realisasi APBN sebagai stimulus kebijakan fiskal.
 - Berlanjutnya stimulus kebijakan moneter.
 - Kemajuan dalam restrukturisasi kredit dan dunia usaha.
 - Dampak positif meluasnya penggunaan media digital.

Pemberlakuan PSBB menyebabkan terbatasnya mobilitas manusia dan barang.

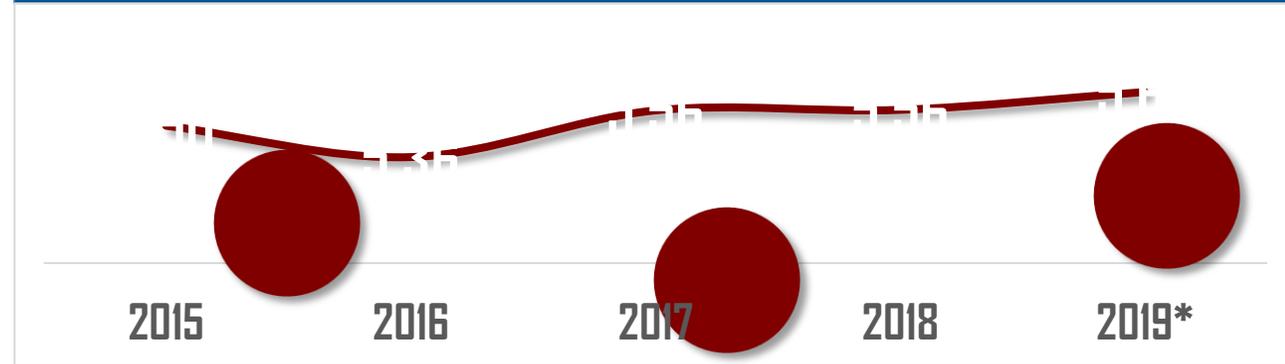
Kontraksi ekspor tidak sebesar prakiraan, didorong permintaan khususnya dari Tiongkok atas beberapa komoditas ekspor seperti besi dan baja, bijih logam, serta *pulp* dan *waste paper*.

EKONOMI JAWA TENGAH



- Pada semester I-2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi COVID-19.
- Sektor yang masih tumbuh positif selama semester I-2020 meliputi Informasi dan Komunikasi, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
- Sementara sektor yang mengalami pertumbuhan negatif antara lain Transportasi dan Perdagangan, Penyediaan Akomodasi dan Mamin, serta Jasa Lainnya.

PERTUMBUHAN EKONOMI EKS KARESIDENAN PEKALONGAN 2015 - 2019



DAMPAK MINIMAL



Informasi dan Komunikasi



Jasa Pendidikan



Pertanian, Kehutanan & Perikanan

DAMPAK SIGNIFIKAN



Transportasi dan Pergudangan



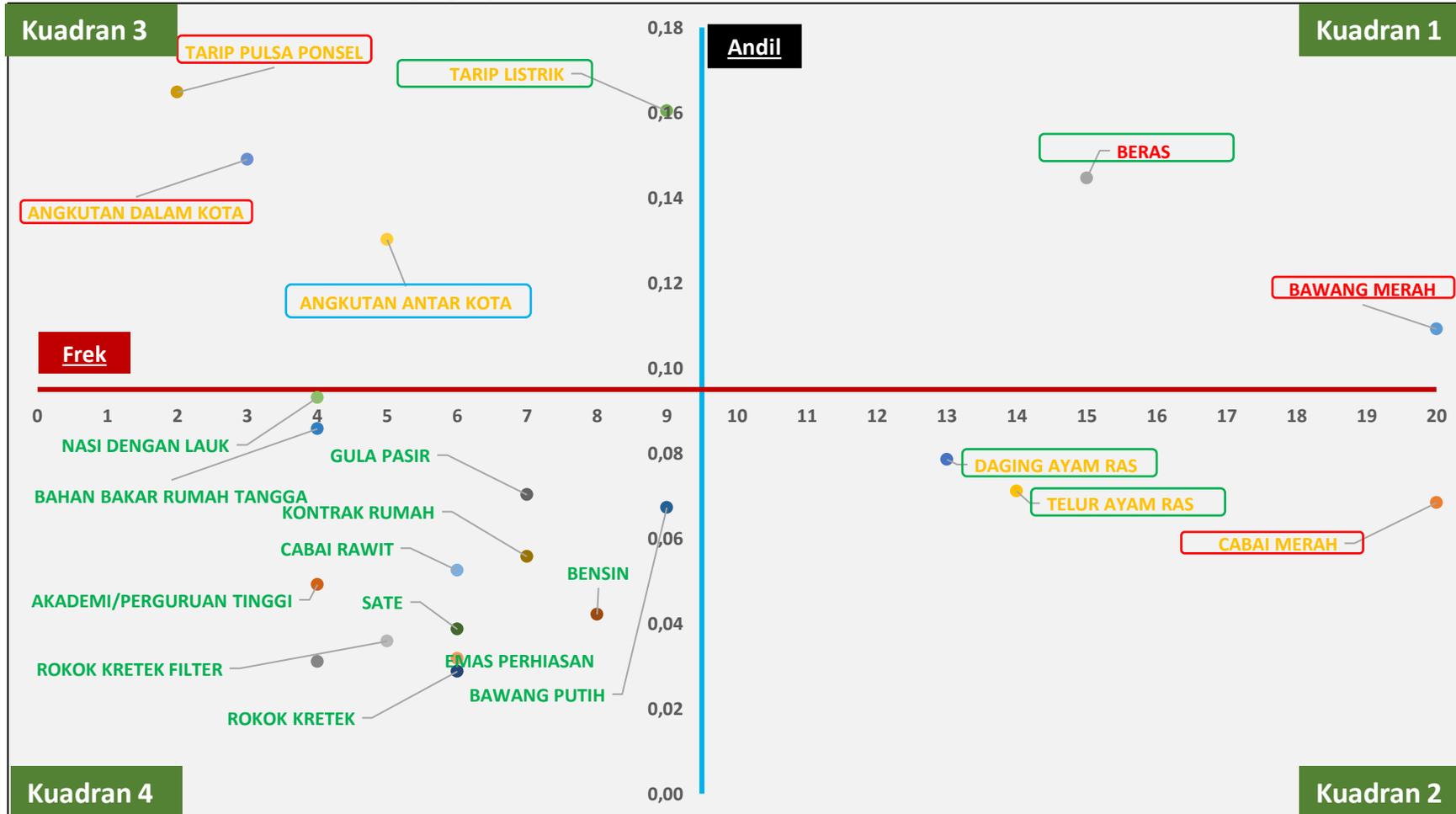
Jasa Lainnya



Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Historis Inflasi Kota Tegal 2016 - 2019

Kuadran inflasi menggambarkan komoditas yang memiliki andil besar terhadap inflasi di Kota Tegal dengan frekuensi tingkat kemunculan tertinggi pada kurun waktu tertentu. Komoditas yang berada di **kuadran 1** menjadi fokus perhatian saat ini (jangka pendek), sedangkan komoditas di kuadran lainnya menjadi perhatian berikutnya karena apabila terjadi peningkatan konsumsi atau terjadi supply shock maka komoditas tsb akan berpindah ke kuadran 1. Pada kurun waktu 2016-2019, komoditas yang menjadi prioritas untuk diwaspadai menjadi penyumbang utama inflasi di Kota Tegal adalah Bawang Merah, Beras, Cabai Merah, Telur Ayam Ras dan Daging Ayam Ras.



CORE INFLATION

-

VOLATILE FOOD

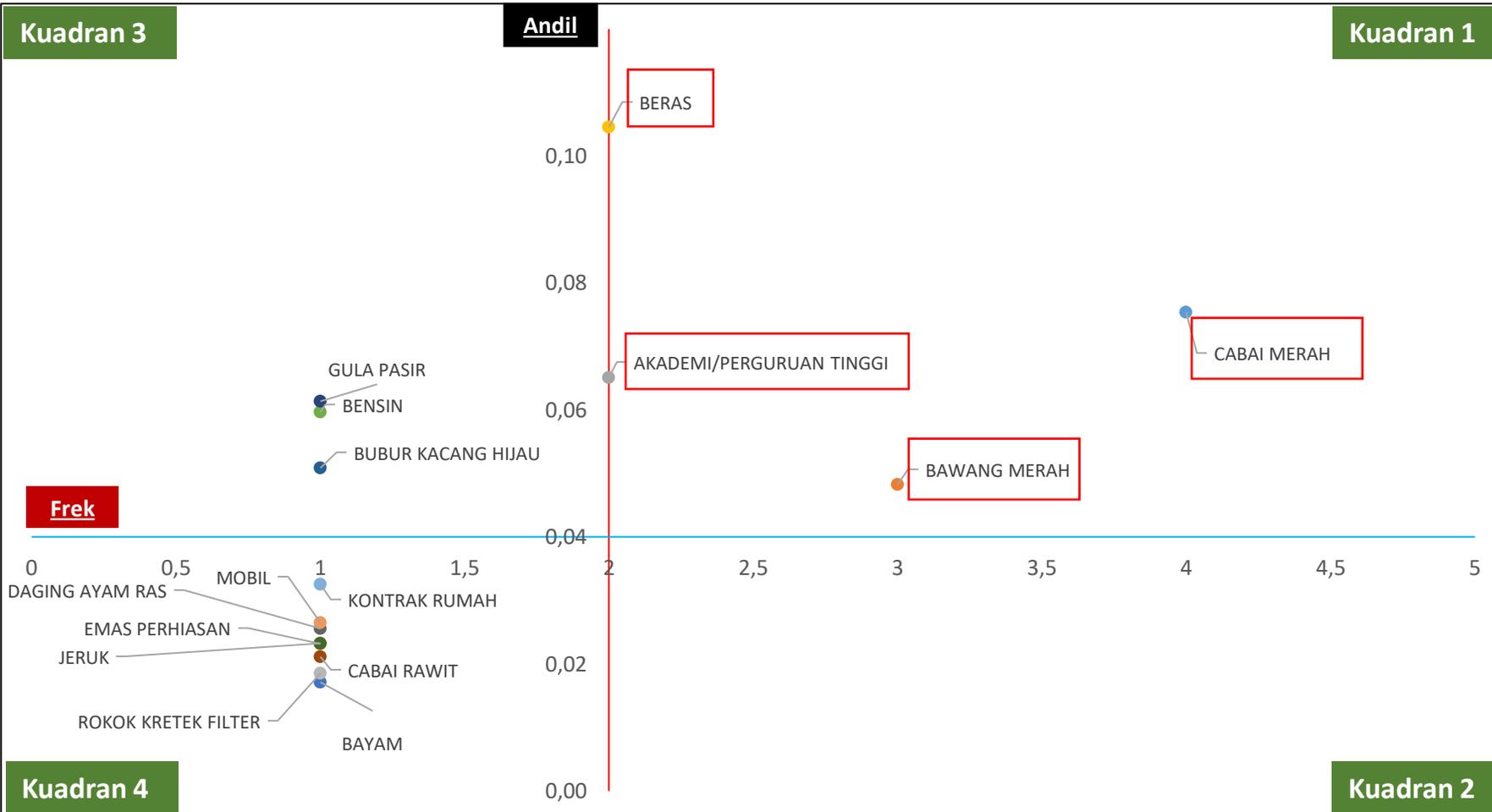
- Beras
- Bawang Merah
- Cabe Merah
- Telur Ayam Ras
- Daging Ayam Ras

ADMINISTERED PRICES

- Tarif listrik
- Tarif pulsa ponsel
- Angkutan antar kota
- Angkutan dalam kota

KUADRAN INFLASI KOTA TEGAL Oktober (2015-2019)

Berdasarkan kuadran manajemen risiko inflasi pada bulan Oktober kurun waktu 2015-2019, diperoleh informasi bahwa komoditas volatile foods yang menjadi prioritas untuk diwaspadai menjadi penyumbang utama inflasi di Kota Tegal adalah Cabe Merah, Bawang Merah dan Beras. Komoditas Core Inflation antara lain Biaya Perguruan Tinggi. Perlu diwaspadai peningkatan harga gula pasir dan BBM (kuadran 3).



CORE INFLATION

1. Biaya Perguruan Tinggi
2. Gula Pasir

VOLATILE FOOD

1. Cabe Merah
2. Bawang Merah
3. Beras

ADMINISTERED PRICES

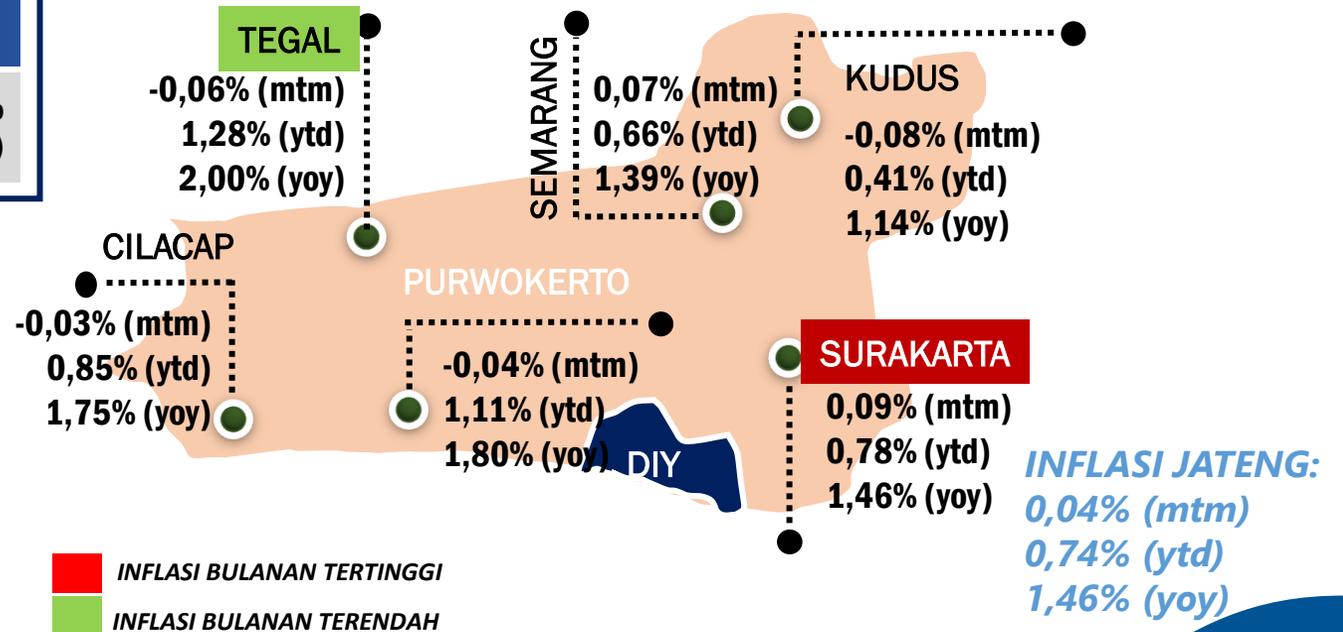
1. Bensin
2. Gula pasir

Perkembangan Inflasi September 2020



- Pada September 2020, Kota Tegal mengalami deflasi sebesar 0,06% (mtm), menurun signifikan dibandingkan inflasi bulanan Kota Tegal pada Agustus 2020 yang tercatat sebesar 0,09% (mtm). Level deflasi ini lebih dalam dibandingkan dengan nasional yang mengalami deflasi sebesar 0,05% (mtm), sedangkan Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,04% (mtm).
- Secara tahunan, inflasi Kota Tegal pada September 2020 sebesar 2,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan nasional sebesar 1,42% (yoy) serta Jawa Tengah sebesar 1,46% (yoy).
- Komoditas penyumbang inflasi bulanan pada september 2020 antara lain bawang putih, cabe merah, ongkos jahit, es dan jeruk.
- Di sisi lain, komoditas penyumbang deflasi bulanan antara lain telur ayam ras, bawang merah, obat dengan resep, gula pasir dan tomat.

PERKEMBANGAN INFLASI JULI 2020 SE-JAWA TENGAH



KOMODITAS PENYUMBANG

INFLASI	Komoditas	Andil (% mtm)
	Bawang Putih	0,04
Cabai Merah	0,03	
Ongkos Jahit	0,02	
Es	0,02	
Jeruk	0,02	

DEFLASI	Komoditas	Andil (% mtm)
	Telur Ayam Ras	-0,10
Bawang Merah	-0,03	
Obat dengan resep	-0,03	
Gula Pasir	-0,02	
Tomat	-0,02	

Proyeksi dan Risiko Inflasi Oktober 2020

Pada Oktober 2020, inflasi Kota Tegal diproyeksikan berada dalam kisaran target inflasi nasional 2020, yaitu $3\pm 1\%$ yang disebabkan oleh terkendalinya harga komoditas *volatile food* yang disertai peran aktif TPID dalam menjaga ekspektasi masyarakat. Namun risiko inflasi yang patut diwaspadai adalah naiknya harga emas perhiasan seiring kenaikan harga komoditas emas dunia.

OKTOBER 2020

Berada dalam kisaran target inflasi nasional 2020:

$3\pm 1\%$

ANGKA
PROYEKSI

UPSIDE POTENTIAL



Potensi kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit sejalan dengan berkurangnya produksi di daerah sentra



Potensi kenaikan harga minyak goreng kemasan akibat larangan penjualan minyak goreng curah



Peningkatan permintaan angkutan luar kota dan angkutan travel dengan adanya momentum libur panjang



Potensi kenaikan harga emas perhiasan seiring kenaikan harga emas dunia

DOWNSIDE RISK



Terkendalinya harga beras akibat penurunan permintaan beras serta peningkatan stok gabah kering giling dan beras di wil. Eks. Krs. Pekalongan



Meredanya tekanan harga bawang merah seiring panen raya di Brebes dan dampak relaksasi impor bawang putih-Februari 2020



Turunnya harga jagung pipilan & komitmen Pemerintah dalam mengontrol pasokan DOC mendukung pengendalian harga daging & telur ayam ras



Normalisasi harga gula pasir sebagai dampak lanjutan realisasi impor *raw sugar* dan pengolahan menjadi gula konsumsi oleh importir

Rekomendasi Kebijakan Berbasis Strategi 4K

1 KETERJANGKAUAN HARGA

PROGRAM STRATEGIS

- **Stabilisasi Harga**
- **Mengelola Permintaan**

SUB-PROGRAM STRATEGIS



- Pelaksanaan **operasi pasar** untuk menjaga tingkat harga komoditas pangan strategis.
- Pelaksanaan **sidak pasar** untuk memantau peningkatan harga yang abnormal / di luar pola pergerakan harga.
- Pembangunan **aplikasi pemantauan harga** yang terkoneksi dengan PIHPS.
- Peningkatan jumlah dan optimalisasi peran **BUMD dan BUMDes Pangan** sebagai perpanjangan tangan Pemda untuk menjalin kerja sama antar daerah yang biasanya bersifat b-to-b.
- Mendorong **penyusunan neraca pangan** sebagai *early warning sistem* gejala permintaan dan penawaran komoditas pangan.



SUB-PROGRAM STRATEGIS



- **Edukasi/sosialisasi TPID** kepada pedagang besar.
- **Pemanfaatan media** dalam pengendalian ekspektasi masyarakat.

2 KETERSEDIAAN PASOKAN

PROGRAM STRATEGIS

- **Memperkuat Produksi dan Cadangan Pangan Pemerintah**
- **Mendukung Pengelolaan Impor-Ekspor Pangan**

SUB-PROGRAM STRATEGIS



- **Program Kampung Peduli Inflasi** di mana masyarakat dapat memanfaatkan lahan kosong untuk menanam berbagai komoditas inflasi seperti cabai, tomat dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- Pengembangan **integrated farming** untuk mendorong produksi.
- Kerja sama dengan BUMN, seperti BULOG untuk **pembangunan Rumah Pangan Kita atau Toko Tani Indonesia**.

4 KOMUNIKASI EFEKTIF

PROGRAM STRATEGIS

- **Memperbaiki Kualitas Data**
- **Memperkuat Koordinasi Pusat & Daerah**



PROGRAM STRATEGIS

Mendorong Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah

3 KELANCARAN DISTRIBUSI

SUB-PROGRAM STRATEGIS



- Mendorong **kerja sama antar daerah (KAD)** dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan.
- **Digitalisasi Pasar Tradisional** untuk menjaga stabilitas harga dan membantu pemasaran UMKM





PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Koordinasi Kebijakan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional



1. Mendorong Sektor Ekonomi Produktif & Aman

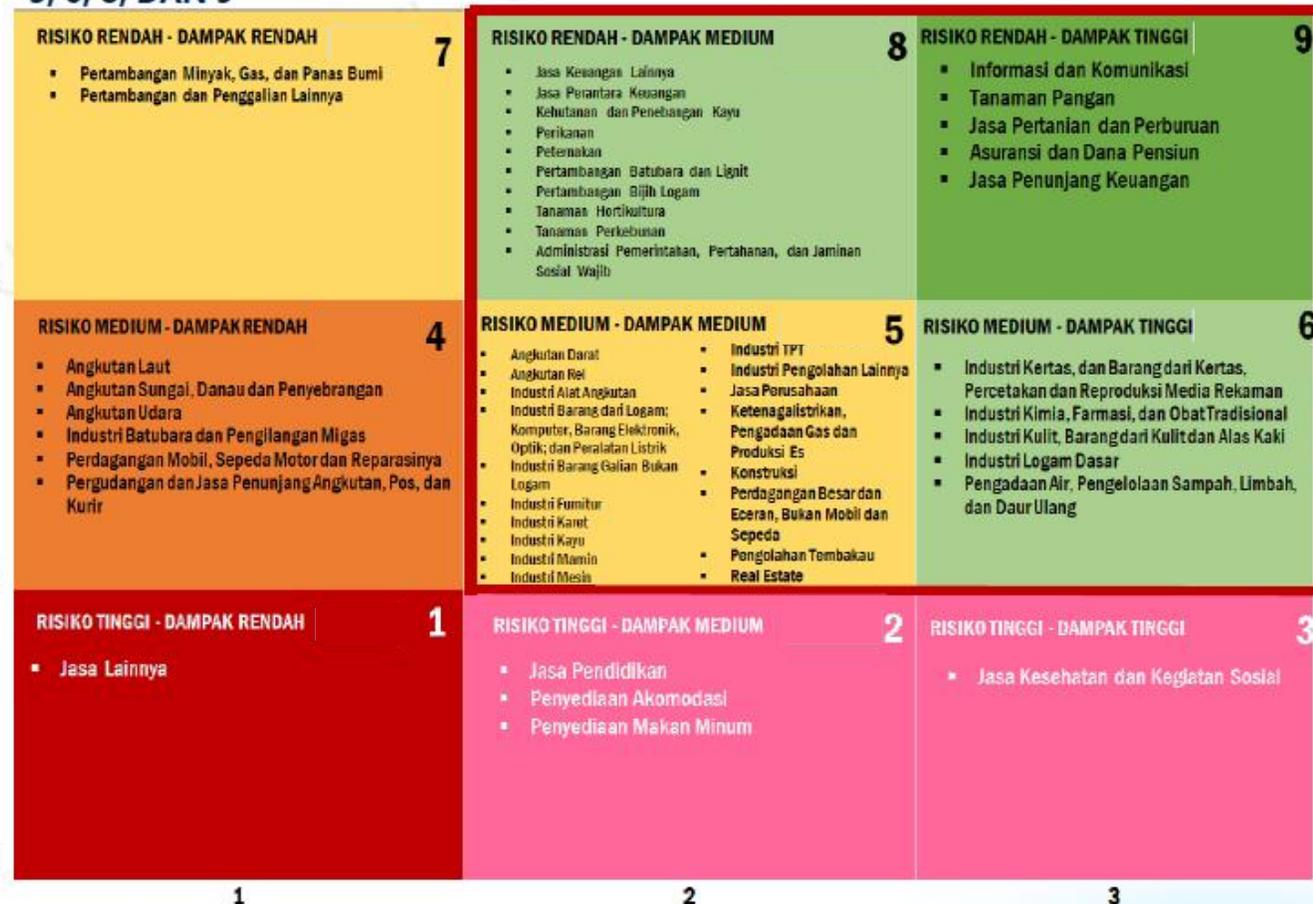
Sektor yg berpotensi adalah sektor yg memberikan nilai tambah pada perekonomian, namun memiliki risiko penyebaran Covid-19 yang rendah...

- Untuk sektor *nontradable* di kuadran 9 merupakan sektor yang memiliki dampak tinggi dan risiko rendah sehingga bisa terus didorong, sementara pada kuadran 5 kebijakan perlu didampingi protokol Covid-19 yg ketat.

PEMETAAN RISIKO PENULARAN BNPB 17 SEKTOR



SEKTOR YG BERPOTENSI DIDORONG TERUTAMA SEKTOR-SEKTOR PADA KELOMPOK 5, 6, 8, DAN 9



Disiplin Protokol Kesehatan

2. Restrukturisasi Kredit dan Dunia Usaha

Peningkatan restru terjadi secara pesat pasca-pandemi COVID-19 dengan realisasi hingga Juli sebesar Rp967.81 T (17,48% dari OS kredit), didominasi oleh kredit UMKM dan Komersial. Bank menargetkan total restru kredit hingga akhir tahun 2020 sebesar 25% dari total OS kredit.

PERKEMBANGAN KREDIT RESTRUKTURISASI Nasional										
Dalam Rp T	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Δ Feb '20 - Jul '20	Δ Des '19 - Jul '20
Outstanding Kredit Restru Total										
Perbankan										
Industri	300.08	298.71	298.98	320.34	516.78	742.55	871.58	967.81	668.83	667.73
% to Kredit	5.34	5.43	5.40	5.61	9.21	13.29	15.71	17.48	12.08	12.06
30BB	239.45	238.60	238.27	256.33	423.62	618.32	724.06	810.36	572.09	570.91
% to Kredit	5.00	5.09	5.06	5.27	8.87	13.01	15.34	17.23	12.16	12.14
PP					20.5	80.6	105.8	120.2		
% to Kredit					4.7	19.2	26.0	N/A*		
Outstanding Kredit Total										
Perbankan										
Industri	5617.0	5502.8	5538.2	5712.0	5610.0	5585.9	5549.2	5536.2	-2.0	-80.8
30BB	4790.1	4685.7	4712.0	4860.1	4773.3	4754.1	4720.5	4704.2	-7.8	-86.0
PP	452.2	449.4	452.3	452.5	435.7	420.3	406.6	N/A*	45.7	45.7

*data total pembiayaan PP dari OJK lag 2 bulan

PERKEMBANGAN KREDIT RESTRUKTURISASI PER SEGMENT											
Segmen	Restru	Dec 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020	Apr 2020	May 2020	Jun 2020	Juli 2020	Δ Feb '20 - Jul '20	Δ Des '19 - Jul '20
Kredit UMKM	O/S Rp T	80.1	81.2	81.5	93.3	220.3	319.0	351.5	384.1	302.6	304.0
	% to Kredit	7.2	7.4	7.3	8.3	20.0	29.7	32.5	35.6	28.0	28.2
Kredit Korporasi	O/S Rp T	113.2	111.5	112.3	118.2	132.1	168.2	201.5	228.6	116.2	115.4
	% to Kredit	5.7	5.9	5.9	5.7	6.6	8.3	10.2	11.5	5.8	5.8
Kredit Komersial	O/S Rp T	77.0	76.3	75.3	78.0	111.4	153.1	184.4	196.5	121.2	119.5
	% to Kredit	7.9	8.0	7.9	8.1	11.6	16.2	19.2	21.0	13.0	12.8
Kredit Konsumsi	O/S Rp T	29.8	29.7	29.8	31.0	53.0	102.2	134.1	158.7	128.8	128.8
	% to Kredit	1.9	1.9	1.9	2.0	3.4	6.6	8.7	10.4	8.4	8.4

2. Restrukturisasi Kredit dan Dunia Usaha

Sampai dengan September 2020, telah dilakukan restrukturisasi kredit perbankan sebanyak 7,04 triliun (\pm 18,67 persen dari baki debit kredit se Eks Karesidenan Pekalongan. Sedangkan restrukturisasi pembiayaan pada Agustus 2020 sebanyak 744 miliar.

Eks Karesidenan Pekalongan

REALISASI RESTRUKTURISASI KREDIT



PERBANKAN
*Per 11 Sep 2020

7.040
MILIAR RUPIAH
145.655
DEBITUR

744
MILIAR RUPIAH

32.678
DEBITUR



PEMBIAYAAN
*Per 28 Agustus 2020

REALISASI PENEMPATAN DANA HIMBARA (EXCLUDE BRI)



1.378
DEBITUR



302,80
MILIAR RUPIAH

*Per 31 Agustus 2020

REALISASI SUBSIDI BUNGA BPR/BPRS



2.125
DEBITUR



54,28
MILIAR RUPIAH

*Per 29 September 2020

Sumber : OJK, 2020

2. Restrukturisasi Kredit dan Dunia Usaha

Pembiayaan Bank utk Sektor Potensial Perlu Didukung Program Penjaminan Pemerintah

Pembiayaan kepada sektor dengan demand tinggi yg tidak sejalan dg risk appetite perbankan perlu dukungan melalui program penjaminan Pemerintah.

		SUPPLY SIDE (PERBANKAN)				
		Minat Perbankan Tinggi	Minat Perbankan Rendah		Perlu Didorong	Netral
DEMAND SIDE (SEKTOR RIIL)	Demand Tinggi	<p>KIMIA (Produk Hygiene, Pharma, dan Nutrition) Demand meningkat</p> <p>TRANSPORTASI (subsektor logistik) Kebutuhan KMK meningkat</p>	<p>OTOMOTIF  (Korp Tier 3 & 4, produsen parts) Risiko tinggi, sudah restru dan bukan parts dari grup besar</p> <p>TEKSTIL  (Tekstil dan Produk Tekstil) Kinerja msh menurun, leverage tinggi dan LaR tinggi</p>			<p>TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</p> <p>HASIL KAYU DAN KEHUTANAN</p> <p>PERTAMBANGAN NON MIGAS</p> <p>INDUSTRI LOGAM</p>
	Demand Rendah	<p>OTOMOTIF (Korporasi Tier 1, Produsen Mobil Listrik) KI utk ekspansi belum urgent shg cenderung wait n see</p> <p>PERKEBUNAN (Kelapa Sawit) Buffer msh cukup dan KI utk replanting atau perluasan kebun msh dpt ditunda</p> <p>MAMIN (Korp Menengah Besar) KI utk otomasi blm urgent shg relatif wait n see</p>	<p>MAMIN (Korp Menengah Kecil) Sudah restru shg bank menahan tambahan kredit</p> <p>TRANSPORTASI (subsektor angkutan penumpang) Risiko cukup tinggi terutama apabila terjadi 2nd wave</p>			
	Netral	<p>PERDAGANGAN</p> <p>PERTANIAN</p> <p>INFRASTRUKTUR / KONSTRUKSI</p> <p>INDUSTRI FMCG</p>			<p>INDUSTRI FURNITUR</p> <p>INDUSTRI ALAS KAKI</p> <p>INDUSTRI ELEKTRONIK</p> <p>INDUSTRI KERTAS</p> <p>PARIWISATA</p>	

 = merupakan **sektor prioritas** pemerintah (berdasarkan PMK 98) sehingga *eligible* mendapatkan program penjaminan pemerintah

3. Tambahan Stimulus Fiskal Penanganan Dampak COVID-19

Pemerintah telah meningkatkan defisit menjadi 6,34% PDB (Rp1.039,2 triliun) untuk memitigasi dampak penyebaran COVID-19, termasuk biaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp677,2 T.

BIAYA PENANGANAN COVID-19

(Rp677,20 T)

Kesehatan

Rp87,55 T

1. Belanja Penanganan Covid-19
2. Insentif Tenaga Medis
3. Santunan Kematian
4. Bantuan Iuran JKN
5. Gugus Tugas Covid-19
6. Insentif Perpajakan di Bidang Kesehatan

Perlindungan Sosial

Rp203,90 T

1. PKH
2. Sembako
3. Bansos Jabodetabke
4. Bansos Non-Jabodetabek
5. Pra Kerja
6. Diskon Listrik
7. Logistik/Pangan/Sembako
8. BLT Dana Desa

Insentif Usaha

Rp120,61 T

1. Cadangan Pengeluaran
2. PPh 21 DTP
3. Pembebasan PPh 22 Impor
4. Pengurangan Angsuran PPh
5. Pengembalian Pendahuluan
6. Penurunan Tarif PPh Badan
7. Stimulus Lainnya

UMKM

Rp123,46 T

1. Subsidi Bunga
2. Penempatan Dana utk Restru
3. Belanja IJP
4. Penjaminan utk Modal Kerja
5. PPh Final UMKM DTP
6. Pembiayaan Investasi kpd Koperasi mellaui LPDB KUMKM

Pembiayaan Korporasi

Rp44,57 T

1. Penempatan Dana utk Restu Padat Karya
2. Belanja IJP Padat Karya
3. Penjaminan untuk Modal Kerja Padat Kerja
4. PMN
5. Talangan untuk Modal Kerja Rp19,65 T

Sektoral & Pemda

Rp97,11 T

1. Program Padat Karya K/L
2. Insentif Perumahan
3. Pariwisata
4. DID Pemulihan Ekonomi
5. Cadangan DAK Fisik
6. Fasilitas Pinjaman Daerah

4. Stimulus Kebijakan BI untuk PEN

Seluruh instrumen kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, yang terkoordinasi erat dengan Pemerintah dan KSSK, di samping menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank Indonesia berkomitmen untuk pendanaan APBN melalui pembelian SBN dari pasar perdana maupun secara langsung. Penyediaan dana likuiditas juga terus dilakukan bagi perbankan untuk kelancaran program restrukturisasi kredit dan dunia usaha.

- 1 Penurunan suku bunga kebijakan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebanyak 4 (empat) kali dalam 2020 sebesar 100 bps menjadi 4,00%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dengan mempertimbangkan rendahnya tekanan inflasi dan relatif stabilnya nilai tukar Rupiah.
- 2 Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN dari pasar sekunder, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global.
- 3 Pelonggaran moneter (*Quantitative Easing*) sebesar Rp651,5 triliun dengan injeksi likuiditas ke perbankan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Perlu percepatan realisasi APBN dan program restrukturisasi kredit.
- 4 Penyediaan pendanaan dan berbagi beban untuk pembiayaan APBN guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional melalui pembelian SBN dari pasar perdana (SKB 16 April 2020) dan secara langsung (SKB 7 Juli 2020).
- 5 Penyediaan pendanaan bagi LPS untuk antisipasi maupun penanganan bank bermasalah melalui mekanisme repo dan/atau pembelian SBN (PP No. 33 Tahun 2020)
- 6 Mempercepat digitalisasi sistem pembayaran berdasarkan untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan fintech untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan.

5. Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 2025

UMKM dan Ekonomi Halal perlu menjadi pendorong penting pertumbuhan ekonomi ke depan. Ekonomi nasional lebih tahan dari gejolak global dengan penciptaan kerja besar dan inklusif. Small is Beautiful. Perlu kebijakan afirmatif melalui pemberdayaan, korporatisasi, dan pembiayaan. BSP12025 untuk akselerasi ekonomi-keuangan digital nasional.

Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Digital 2025

Membawa **91,3 juta penduduk unbanked** dan **62,9 juta UMKM** ke dalam ekonomi dan keuangan formal secara *sustainable* melalui pemanfaatan digitalisasi

Sektor Finansial

Sektor Riil



Digitalisasi UMKM Melalui QRIS

Jumlah merchant QRIS terus meningkat mencapai 4,3 juta merchant pada 7 Agustus 2020, dimana 86% diantaranya merupakan merchant mikro dan kecil.

- Untuk memperluas akseptasi QRIS, BI Pusat dan 46 kantor di berbagai daerah bersama industri mendorong inovasi QRIS bekerjasama dengan seluruh *stakeholders*.
- QRIS juga dipersiapkan sebagai alat pembayaran yang aman untuk diterapkan pada *merchant* sektor pariwisata yang akan segera dibuka di era *new normal*. **Hingga saat ini telah terdapat 37.361 merchant Pariwisata.**

Transaksi QRIS

VOLUME TRANSAKSI (JUTA)



NOMINAL TRANSAKSI (RP MILIAR)



Eks Karesidenan Pekalongan



Kota/Kabupaten	Total
TEGAL	17,269
BREBES	11,396
PEMALANG	7,751
PEKALONGAN	11,506
BATANG	5,291

TOTAL MERCHANT QRIS PANTURA:

53,213*

* Per 25 September 2020

TOTAL MERCHANT QRIS PROV JAWA TENGAH:

419,535*

* Per 25 September 2020

Launching QRIS di beberapa tempat pariwisata



Desa Karangasem – Bali



Desa Wisata Baduy – Banten



Bangsring Underwater – Banyuwangi



Kitagawa Park – Wonogiri



Bromo – Malang



Desa Wisata Cempaka – Tegal



PENGEMBANGAN PASAR TRADISIONAL DIGITAL

Kondisi Masyarakat Saat Ini...!

Dinamika sosial dan lingkungan masyarakat yang mengalami perubahan signifikan di era new normal, menuntut pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan, cepat, tepat, efisien namun tetap memperhatikan keamanan dan kesehatan.



Kondisi Pandemi Covid-19



Tuntutan Pekerjaan



Kondisi Cuaca dan Iklim



Tuntutan Rumah Tangga

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPI), s.d Juli 2020 :

1. Tercatat 1.251 pedagang terkonfirmasi positif Covid-19.
2. Tersebar di 211 pasar di 89 kabupaten/kota dari 27 provinsi di Indonesia.



Digitalization : the digital way to accelerate business processes



Pasar Digital



Pembayaran Digital



Transportasi Online



Pertemuan Virtual

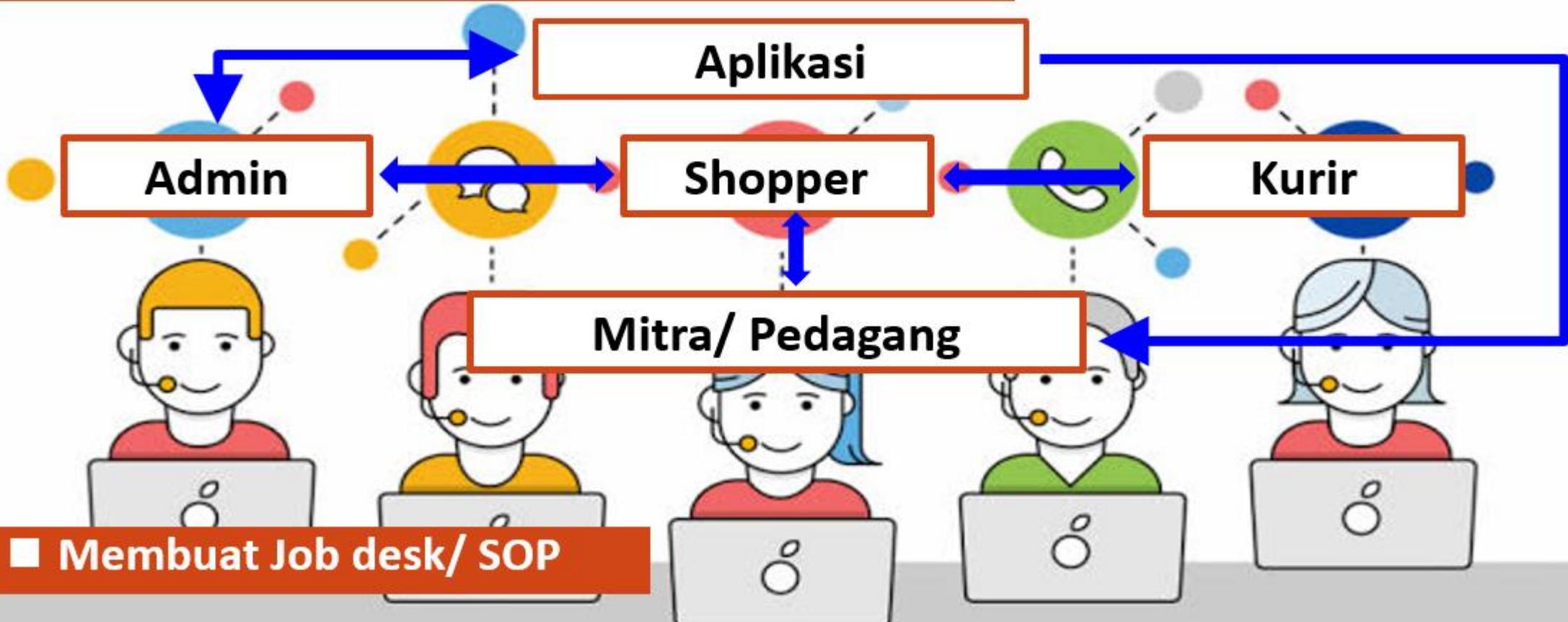


Work From Home

Milestone Pengembangan Pasar Digital

Berdasarkan pengalaman empiris, pasar online tersebut perlu melibatkan paguyuban pedagang pasar yang berperan sebagai administrator, shopper dan deliver (kurir) sehingga bisnis model dapat solid dan berkelanjutan. Pemda dapat mendorong implementasi pilot project pasar digital melalui paguyuban untuk kemudian direplikasi apabila telah sukses.

■ Bentuk team inti sebagai pondasi awal



■ Membuat Job desk/ SOP

Milestone Pengembangan Pasar Digital

Setiap tahapan pembangunan pasar online harus dilakukan evaluasi untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.

Rencana Bisnis Pasar Digital

- Membuat rencana kerja
- Membuat strategi penjualan
- Membuat rencana anggaran
- Membuat strategi pemasaran
- Menentukan target

Pengembangan Aplikasi Pasar Digital



Uji Coba Aplikasi



Penentuan Homepage



Launching dan Sosialisasi

Perkembangan Pasar *Online* di Kota Tegal

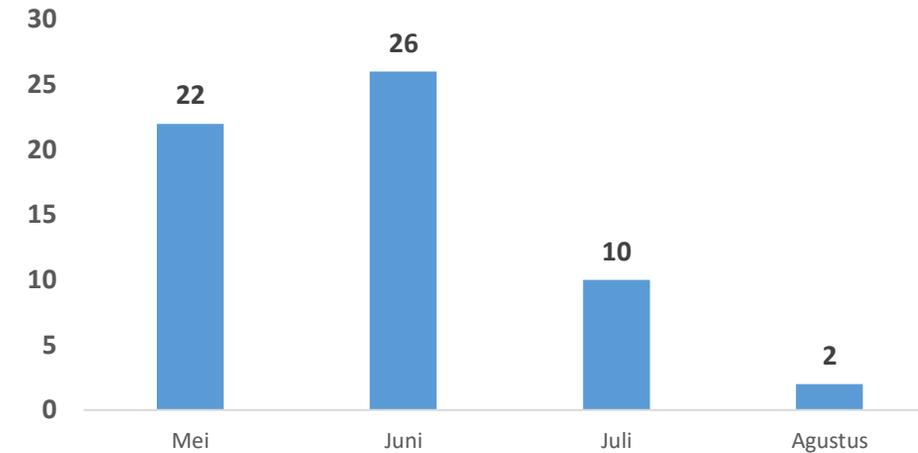
Platform pasar online yang telah dikembangkan di Kota Tegal yaitu www.pasartegal.com namun saat ini belum terdapat operator dan pengelola yang *dedicated* sehingga jumlah pedagang dan promosi belum optimal.

The screenshot shows the homepage of PASARTEGAL.COM. At the top, there is a navigation bar with links for HOME, PRODUK, and ABOUT US. Below this is a search bar and a banner for 'organique' with the slogan 'FRESH EVERY DAY, HEALTHY FRIEND!' and an 'ORDER NOW' button. The main section is titled 'PRODUK TERBARU' (New Products) and features a grid of product listings:

- Lemon:** Rp 60.000 (Promo) / Rp 50.000
- Seblak Mantoel:** Rp 6.000
- Usus Kriuk dan Kerupuk Seblak Hot:** Rp 12.000 / Rp 8.500
- Aneka Jajan Lia:** Rp 55.000 / Rp 52.000
- Prima Black Garlic:** Rp 50.000 / Rp 45.000

Other products visible include ULEGAN, Bumbu Praktis Mama Hebat, and various fresh vegetables.

Penjualan per bulan



Volume penjualan di *platform marketplace local* masih sedikit, perlu perbaikan pada aspek pengelolaan, penambahan variasi produk dan peningkatan pelayanan.

Perkembangan Pasar *Online* di Batang

Platform pasar online yang telah dikembangkan di Kabupaten Batang yaitu dotukura yang digunakan untuk memfasilitasi jual/beli kebutuhan pokok masyarakat melalui pasar tradisional online yang pembayarannya diintegrasikan dengan QRIS.



Dotukura



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

PENUTUP TERIMA KASIH





TIM PERLUASAN DAN PERCEPATAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)

ETP adalah suatu upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemda dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital*

Diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan Pemda melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk, dan saluran distribusi**

Tujuan

Jenis transaksi

Landasan Hukum

Pendapatan, a.l.:
Pajak Daerah,
Retribusi Daerah

Belanja, a.l.:
Belanja pegawai,
Belanja barang
dan jasa, Belanja
modal

ETP



- ❑ **PERPRES No. 82 Tahun 2016** tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif → terkait Aksi Keuangan Inklusif pada Pilar Pelayanan Keuangan di Sektor Pemerintah (Lamp.Perpres)
- ❑ **INPRES No.10 Tahun 2016** tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 → terkait percepatan implementasi transaksi nontunai pada Pemda.
- ❑ **PERPRES No.54 Tahun 2018** Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi → terkait pembatasan transaksi tunai.
- ❑ **SE MENDAGRI No.910/1866/SJ & No. 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017***** serta **SE MENDAGRI No.910/14003/SJ & No. 910/14005/SJ tanggal 13 Desember 2019** tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemda Provinsi dan Kota/Kab.

*Nota Kesepahaman mengenai Koordinasi Percepatan dan Perluasan ETP d/r Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional, 13 Februari 2020

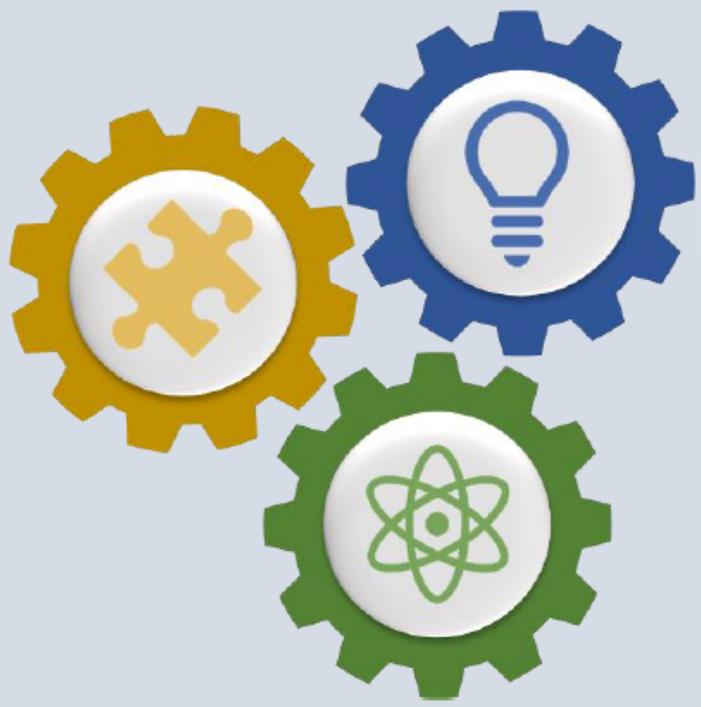
**Pedoman Elektronifikasi di Kantor Perwakilan, BI, 2020

***Non Tunai mencakup a.l Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, dan uang elektronik

ETP meningkatkan optimalisasi PAD, kemudahan usaha, dan tata kelola pemerintahan. Hasil analisa kuantitatif menunjukkan ETP dapat menjaga resiliensi perolehan PAD, baik dalam kondisi pertumbuhan ekonomi normal maupun kontraksi...

PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

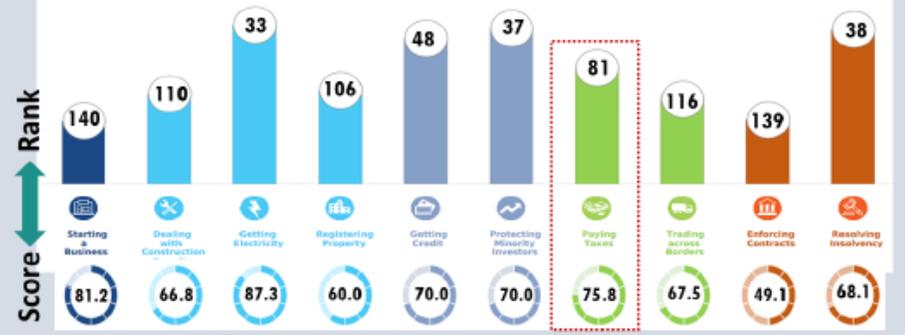
- Dari hasil estimasi Bank Indonesia (BI, 2020):
 - ✓ ETP secara signifikan meningkatkan PAD apabila pemanfaatan masyarakat terhadap ETP sudah cukup tinggi.
 - ✓ Dalam skenario pertumbuhan ekonomi berjalan normal/berat/sangat berat, ETP mampu meningkatkan upaya menjaga Pendapatan Asli Daerah.
- Elektronifikasi berkontribusi terhadap peningkatan PAD sebesar 11,1%, yoy (SNKI, Nov 2019)
- Peningkatan PAD rata-rata hingga 14% dari 9 daerah pelaksana pilot project ETP (Des 2019)



PERBAIKAN KUALITAS EASE OF DOING BUSINESS

*dengan pelaporan dan pembayaran pajak online***

Ease of Doing Business 2020		Payment Taxes	2017	2018	2019	2020
Rank			104	114	112	81
Score			69.25	68.04	68.03	75.8



Sumber: Economy Profile Indonesia, Doing Business 2020, World Bank Group

* 1) Rencana kegiatan akselerasi peningkatan penerimaan daerah;
 2) Laporan realisasi akselerasi peningkatan penerimaan daerah
 **Diterapkan di Jakarta dan Surabaya

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

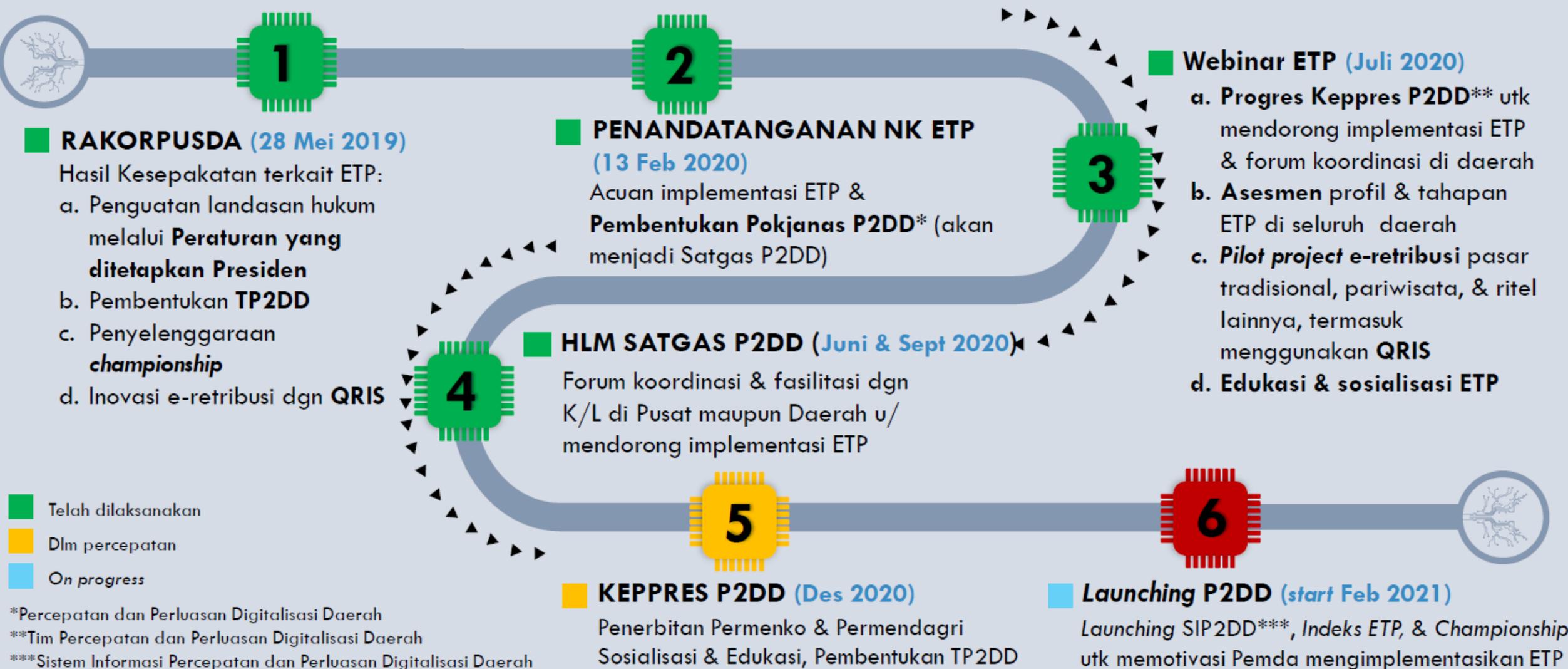
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
 "KPK memasukkan peningkatan PAD sbg faktor keberhasilan program pemberantasan korupsi terintegrasi"



Capaian Optimalisasi PAD (KPK)
 (2018) 38%  50% (2019)

Milestone ETP dan Pembentukan TP2DD

Kesepakatan Rakorpusda Mei 2019 menginisiasi komitmen K/L dlm mendorong implementasi ETP, yg diperkuat dgn Nota Kesepahaman (NK) ETP pada 13 Februari 2020. NK menandai terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) P2DD sebagai forum koordinasi di level pusat yg akan mendorong implementasi ETP di seluruh daerah...



Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) adalah forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas ETP dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi tata kelola keuangan.

Tugas TP2DD

a. melakukan pengumpulan data dan informasi transaksi terkait ETP.

b. melakukan asesmen terkait ETP

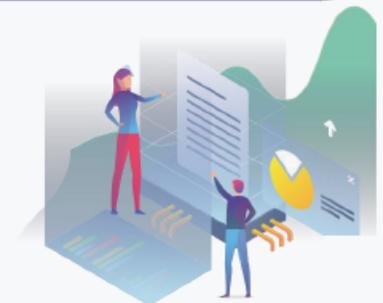
c. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan ETP yang terkait dengan:

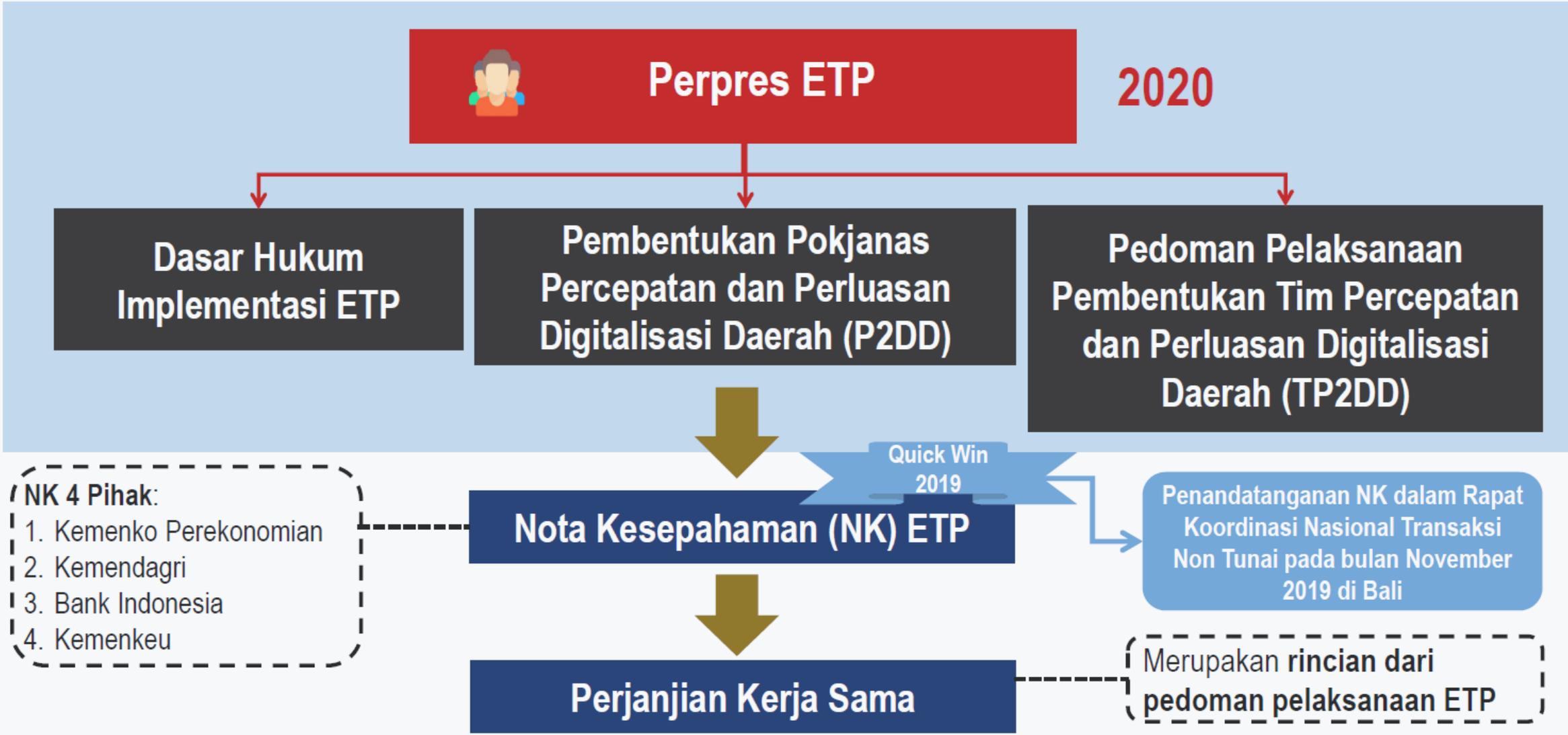
1. informasi dan/atau data;
2. inovasi dan teknologi;
3. infrastruktur; serta
4. koordinasi dan ketentuan;

d. menyusun rencana aksi, serta strategi dan rekomendasi kebijakan terkait ETP sesuai arah kebijakan Pokjanas P2DD.

e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap semester selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya dengan tata cara sebagai berikut:

1. TP2DD Provinsi menyampaikan laporan secara langsung kepada Pokjanas P2DD;
2. TP2DD Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Pokjanas P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi di wilayahnya





Pokjanas P2DD

Mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh TP2DD dalam mendorong inovasi dan perluasan ETP



TPDD Provinsi

- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- KPw BI
- Instansi Vertikal

TPDD Kabupaten/Kota

- Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- KPw BI
- Instansi Vertikal

Mitra Kerja

- Asosiasi terkait (a.l IDEA, Asosiasi Fintech, ASPI, ASBANDA)
- Marketplace e-commerce
- Perbankan
- Fintech/Startup digital
- Konsultan
- Akademisi



TP2DD Provinsi

Ketua : Gubernur

Wakil : Kepala KPwDN BI Provinsi

Sekretaris : Sekretaris Daerah Prov

Pelaksana

Harian : Ka Badan yang membidangi pengelolaan keu dan aset daerah

Anggota : Ka Badan yang membidangi pendapatan daerah (jika ada), Ka Perangkat Daerah terkait (jika ada), Kepala Divisi/Kel. KPwDN BI, dan instansi vertikal (jika diperlukan)

TP2DD Kab./Kota

Ketua : Bupati/Walikota

Wakil : Kepala KPwDN BI Kab./Kota atau pejabat KPwDN BI Prov yang mewilayahi

Sekretaris : Sekretaris Daerah Kab./Kota

Pelaksana

Harian : Ka Badan yg membidangi pengelolaan keu dan aset daerah

Anggota : Ka Badan yang membidangi pendapatan daerah (jika ada), Ka Perangkat Daerah terkait (jika ada), Kepala Divisi/Kel. KPwDN BI, dan instansi vertikal (jika diperlukan)

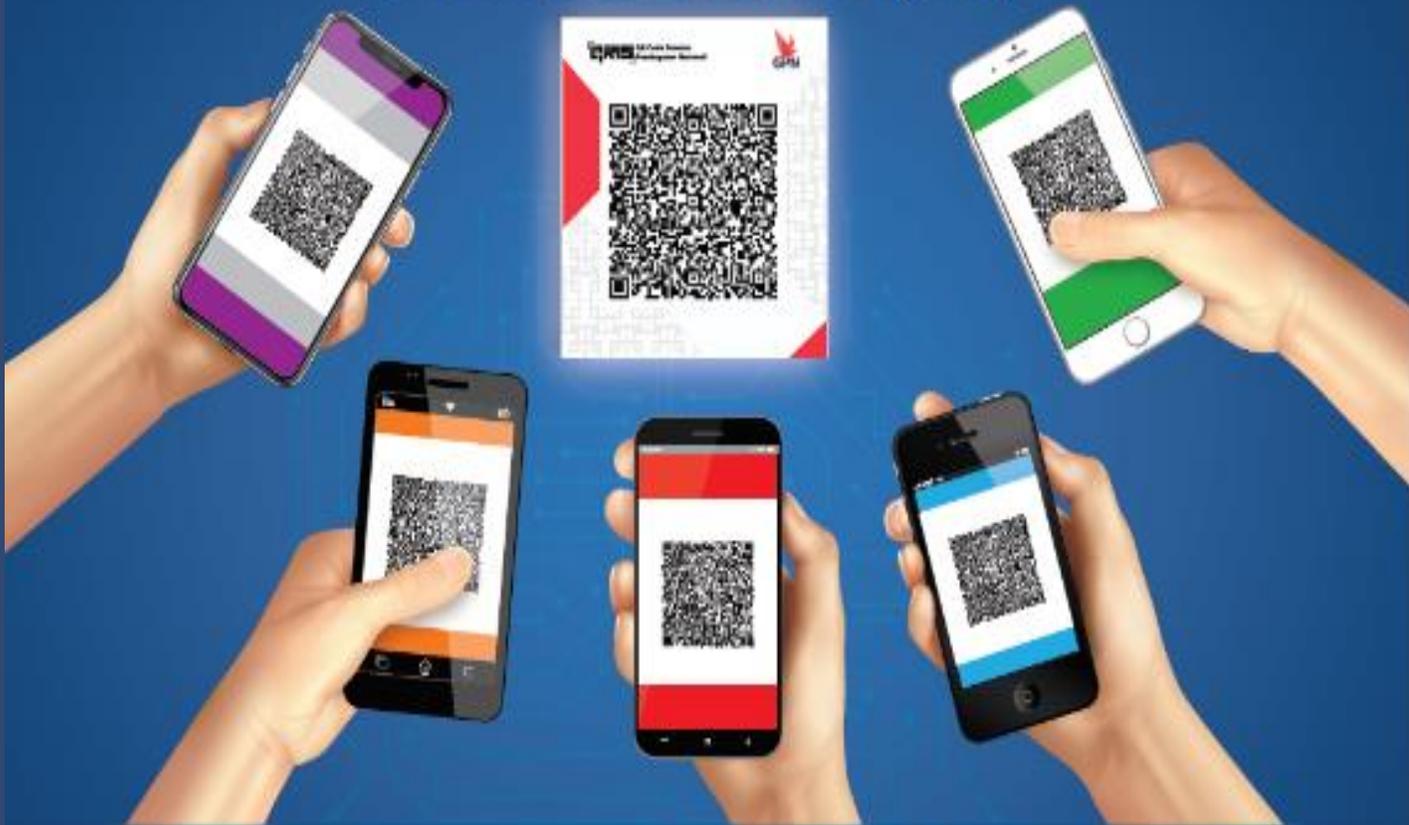
Piloting TP2DD adalah forum koordinasi di tingkat Provinsi/Kab/Kota dalam rangka akselerasi dan perluasan ETP yang beranggotakan Pemda dan KPwDN yang membawahi untuk kemudian dikukuhkan sebagai TPDD.

Persyaratan Piloting TP2DD

- 1 Memiliki struktur dan tupoksi organisasi.
- 2 Memiliki rencana aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) minimal jangka pendek (s.d. 2 tahun), a.l: identifikasi transaksi ETP saat ini dan potensi ke depan.
- 3 Memiliki target program.
- 4 Menyusun laporan *piloting* a.l: hal – hal yang telah dilakukan, kendala, dan capaian.

Satu QR Code, untuk Seluruh Pembayaran

QR Code Indonesian Standard (QRIS)



Terima Kasih

QRIS dapat discan oleh semua aplikasi dengan fitur pembayaran QR.

- www.bi.go.id
- [BankIndonesiaChannel](#)
- [BankIndonesiaOfficial](#)
- [@bank_indonesia](#)
- [bank_indonesia](#)
- [Contact Center 1191](#)